



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta untuk melaksanakan ketentuan amanat Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan adanya suatu penetapan terhadap desa yang sudah ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan
Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa yang terletak di 31 (tiga puluh satu) Kecamatan di wilayah Daerah.
- (2) Daftar penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat Perubahan nama atau penambahan atau pengurangan terhadap daftar Desa, dilaksanakan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penataan desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT: (8/84/2025)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DESY ARYANTI, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19770923 201001 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Pengaturan Desa dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, artinya Pemerintah Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa paling lama tanggal 14 Januari 2015. Namun sampai saat ini amanat tersebut belum dapat terlaksana sampai saat ini. Meskipun sedikit terlambat namun amanat tersebut tetap harus dilaksanakan secepatnya, hal ini juga dilakukan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan Daerah ini memuat terkait dengan Penetapan Desa yang mencakup daftar seluruh desa di Kabupaten Bandung beserta kode wilayah, serta pengaturan lainnya terkait dengan adanya penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan terhadap daftar desa yang telah ditetapkan. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur terkait dengan penegasan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pembentukan desa, dinyatakan masih tetap berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 118

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DESA

DAFTAR PENETAPAN DESA

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
1	Cileunyi	Cileunyi Kulon	32.04.05.2001
2	Cileunyi	Cileunyi Wetan	32.04.05.2002
3	Cileunyi	Cimekar	32.04.05.2003
4	Cileunyi	Cinunuk	32.04.05.2004
5	Cileunyi	Cibiru Hilir	32.04.05.2005
6	Cileunyi	Cibiru Wetan	32.04.05.2006
7	Cimenyan	Cimenyan	32.04.06.2003
8	Cimenyan	Mandalamekar	32.04.06.2004
9	Cimenyan	Cikadut	32.04.06.2005
10	Cimenyan	Ciburial	32.04.06.2006
11	Cimenyan	Sindanglaya	32.04.06.2007
12	Cimenyan	Mekarsaluyu	32.04.06.2008
13	Cimenyan	Mekarmanik	32.04.06.2009
14	Cilengkrang	Jatiendah	32.04.07.2001
15	Cilengkrang	Cilengkrang	32.04.07.2002
16	Cilengkrang	Cipanjalu	32.04.07.2003
17	Cilengkrang	Melatiwangi	32.04.07.2004
18	Cilengkrang	Ciporeat	32.04.07.2005
19	Cilengkrang	Girimekar	32.04.07.2006
20	Bojongsoang	Lengkong	32.04.08.2001
21	Bojongsoang	Bojongsoang	32.04.08.2002
22	Bojongsoang	Buahbatu	32.04.08.2003
23	Bojongsoang	Cipagalo	32.04.08.2004
24	Bojongsoang	Bojongsari	32.04.08.2005
25	Bojongsoang	Tegalluar	32.04.08.2006
26	Margahayu	Margahayu Tengah	32.04.09.2001
27	Margahayu	Margahayu Selatan	32.04.09.2002
28	Margahayu	Sukamenak	32.04.09.2003
29	Margahayu	Sayati	32.04.09.2005
30	Margaasih	Margaasih	32.04.10.2001
31	Margaasih	Lagadar	32.04.10.2002
32	Margaasih	Nanjung	32.04.10.2003
33	Margaasih	Mekarrahayu	32.04.10.2004
34	Margaasih	Rahayu	32.04.10.2005
35	Margaasih	Cigondewah Hilir	32.04.10.2006
36	Katapang	Sangkanhurip	32.04.11.2001
37	Katapang	Katapang	32.04.11.2002
38	Katapang	Gandasari	32.04.11.2004
39	Katapang	Sukamukti	32.04.11.2006
40	Katapang	Cilampeni	32.04.11.2007

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
41	Katapang	Pangauban	32.04.11.2008
42	Katapang	Banyusari	32.04.11.2009
43	Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	32.04.12.2002
44	Dayeuhkolot	Cangkuang Wetan	32.04.12.2003
45	Dayeuhkolot	Cangkuang Kulon	32.04.12.2004
46	Dayeuhkolot	Sukapura	32.04.12.2005
47	Dayeuhkolot	Citeureup	32.04.12.2006
48	Banjaran	Kamasan	32.04.13.2001
49	Banjaran	Banjaran Wetan	32.04.13.2002
50	Banjaran	Banjaran	32.04.13.2003
51	Banjaran	Ciapus	32.04.13.2005
52	Banjaran	Sindangpanon	32.04.13.2006
53	Banjaran	Kiangroke	32.04.13.2007
54	Banjaran	Tarajusari	32.04.13.2008
55	Banjaran	Mekarjaya	32.04.13.2012
56	Banjaran	Margahurip	32.04.13.2013
57	Banjaran	Neglasari	32.04.13.2016
58	Banjaran	Pasirmulya	32.04.13.2018
59	Pameungpeuk	Sukasari	32.04.14.2001
60	Pameungpeuk	Bojongmanggu	32.04.14.2002
61	Pameungpeuk	Rancatungku	32.04.14.2003
62	Pameungpeuk	Bojongkunci	32.04.14.2004
63	Pameungpeuk	Rancamulya	32.04.14.2005
64	Pameungpeuk	Langonsari	32.04.14.2006
65	Pangalengan	Pangalengan	32.04.15.2001
66	Pangalengan	Margaluyu	32.04.15.2002
67	Pangalengan	Warnasari	32.04.15.2003
68	Pangalengan	Sukamanah	32.04.15.2004
69	Pangalengan	Lamajang	32.04.15.2005
70	Pangalengan	Margamukti	32.04.15.2006
71	Pangalengan	Margamulya	32.04.15.2007
72	Pangalengan	Banjarsari	32.04.15.2008
73	Pangalengan	Sukaluyu	32.04.15.2009
74	Pangalengan	Tribaktimulya	32.04.15.2010
75	Pangalengan	Pulosari	32.04.15.2011
76	Pangalengan	Wanasuka	32.04.15.2012
77	Pangalengan	Margamekar	32.04.15.2013
78	Arjasari	Arjasari	32.04.16.2001
79	Arjasari	Lebakwangi	32.04.16.2002
80	Arjasari	Batukarut	32.04.16.2003
81	Arjasari	Ancolmekar	32.04.16.2004
82	Arjasari	Baros	32.04.16.2005
83	Arjasari	Mangunjaya	32.04.16.2006
84	Arjasari	Mekarjaya	32.04.16.2007
85	Arjasari	Pinggirsari	32.04.16.2008
86	Arjasari	Patrolsari	32.04.16.2009
87	Arjasari	Rancakole	32.04.16.2010
88	Arjasari	Wargaluyu	32.04.16.2011

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
89	Cimaung	Cimaung	32.04.17.2001
90	Cimaung	Jagabaya	32.04.17.2002
91	Cimaung	Pasirhuni	32.04.17.2003
92	Cimaung	Campakamulya	32.04.17.2004
93	Cimaung	Cipinang	32.04.17.2005
94	Cimaung	Mekarsari	32.04.17.2006
95	Cimaung	Sukamaju	32.04.17.2007
96	Cimaung	Cikalong	32.04.17.2008
97	Cimaung	Malasari	32.04.17.2009
98	Cimaung	Warjabakti	32.04.17.2010
99	Cicalengka	Cicalengka Kulon	32.04.25.2001
100	Cicalengka	Cicalengka Wetan	32.04.25.2002
101	Cicalengka	Babakan Peuteuy	32.04.25.2003
102	Cicalengka	Cikuya	32.04.25.2004
103	Cicalengka	Dampit	32.04.25.2005
104	Cicalengka	Margaasih	32.04.25.2006
105	Cicalengka	Narawita	32.04.25.2007
106	Cicalengka	Panenjoan	32.04.25.2008
107	Cicalengka	Tanjungwangi	32.04.25.2009
108	Cicalengka	Tenjolaya	32.04.25.2010
109	Cicalengka	Waluya	32.04.25.2011
110	Cicalengka	Nagrog	32.04.25.2012
111	Nagreg	Nagreg	32.04.26.2001
112	Nagreg	Bojong	32.04.26.2002
113	Nagreg	Ciaro	32.04.26.2003
114	Nagreg	Ciherang	32.04.26.2004
115	Nagreg	Citaman	32.04.26.2005
116	Nagreg	Mandalawangi	32.04.26.2006
117	Nagreg	Nagreg Kendan	32.04.26.2007
118	Nagreg	Ganjar Sabar	32.04.26.2008
119	Cikancung	Mandalasari	32.04.27.2001
120	Cikancung	Cikancung	32.04.27.2002
121	Cikancung	Cikasungka	32.04.27.2003
122	Cikancung	Cihanyir	32.04.27.2004
123	Cikancung	Ciluluk	32.04.27.2005
124	Cikancung	Hegarmanah	32.04.27.2006
125	Cikancung	Mekarlaksana	32.04.27.2007
126	Cikancung	Tanjunglaya	32.04.27.2008
127	Cikancung	Srirahayu	32.04.27.2009
128	Rancaekek	Rancaekek Wetan	32.04.28.2001
129	Rancaekek	Rancaekek Kulon	32.04.28.2002
130	Rancaekek	Bojongsalam	32.04.28.2003
131	Rancaekek	Bojongloa	32.04.28.2004
132	Rancaekek	Jelegong	32.04.28.2005
133	Rancaekek	Linggar	32.04.28.2006
134	Rancaekek	Cangkuang	32.04.28.2007
135	Rancaekek	Haurpugur	32.04.28.2008
136	Rancaekek	Sukamanah	32.04.28.2009

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
137	Rancaekek	Sukamulya	32.04.28.2010
138	Rancaekek	Tegal Sumedang	32.04.28.2011
139	Rancaekek	Sangiang	32.04.28.2012
140	Rancaekek	Nanjung Mekar	32.04.28.2013
141	Ciparay	Ciparay	32.04.29.2001
142	Ciparay	Gunungleutik	32.04.29.2002
143	Ciparay	Mekarsari	32.04.29.2003
144	Ciparay	Cikoneng	32.04.29.2004
145	Ciparay	Ciheulang	32.04.29.2005
146	Ciparay	Pakutandang	32.04.29.2006
147	Ciparay	Sumbersari	32.04.29.2007
148	Ciparay	Manggungharja	32.04.29.2008
149	Ciparay	Sagaracipta	32.04.29.2009
150	Ciparay	Sarimahi	32.04.29.2010
151	Ciparay	Serangmekar	32.04.29.2011
152	Ciparay	Babakan	32.04.29.2012
153	Ciparay	Bumiwangi	32.04.29.2013
154	Ciparay	Mekarlaksana	32.04.29.2014
155	Pacet	Cipeujeuh	32.04.30.2001
156	Pacet	Cikitu	32.04.30.2002
157	Pacet	Cinanggela	32.04.30.2003
158	Pacet	Maruyung	32.04.30.2004
159	Pacet	Sukarame	32.04.30.2005
160	Pacet	Nagrak	32.04.30.2006
161	Pacet	Cikawao	32.04.30.2007
162	Pacet	Mekarjaya	32.04.30.2008
163	Pacet	Pangauban	32.04.30.2009
164	Pacet	Mandalahaji	32.04.30.2010
165	Pacet	Girimulya	32.04.30.2011
166	Pacet	Tanjungwangi	32.04.30.2012
167	Pacet	Mekarsari	32.04.30.2013
168	Kertasari	Sukapura	32.04.31.2001
169	Kertasari	Cibeureum	32.04.31.2002
170	Kertasari	Santosa	32.04.31.2003
171	Kertasari	Tarumajaya	32.04.31.2004
172	Kertasari	Neglawangi	32.04.31.2005
173	Kertasari	Cihawuk	32.04.31.2006
174	Kertasari	Cikembang	32.04.31.2007
175	Kertasari	Resmi Tingal	32.04.31.2008
176	Baleendah	Bojongmalaka	32.04.32.2005
177	Baleendah	Rancamanyar	32.04.32.2006
178	Baleendah	Malakasari	32.04.32.2007
179	Majalaya	Majalaya	32.04.33.2001
180	Majalaya	Wangisagara	32.04.33.2002
181	Majalaya	Biru	32.04.33.2003
182	Majalaya	Padamulya	32.04.33.2004
183	Majalaya	Bojong	32.04.33.2005
184	Majalaya	Majasetra	32.04.33.2006

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
185	Majalaya	Majakerta	32.04.33.2007
186	Majalaya	Sukamaju	32.04.33.2008
187	Majalaya	Padaulun	32.04.33.2009
188	Majalaya	Neglasari	32.04.33.2010
189	Majalaya	Sukamukti	32.04.33.2011
190	Solokanjeruk	Rancakasumba	32.04.34.2001
191	Solokanjeruk	Solokanjeruk	32.04.34.2002
192	Solokanjeruk	Cibodas	32.04.34.2003
193	Solokanjeruk	Panyadap	32.04.34.2004
194	Solokanjeruk	Bojongemas	32.04.34.2005
195	Solokanjeruk	Padamukti	32.04.34.2006
196	Solokanjeruk	Langensari	32.04.34.2007
197	Paseh	Cigentur	32.04.35.2001
198	Paseh	Cipedes	32.04.35.2002
199	Paseh	Loa	32.04.35.2003
200	Paseh	Cijagra	32.04.35.2004
201	Paseh	Cipaku	32.04.35.2005
202	Paseh	Sindangsari	32.04.35.2006
203	Paseh	Drawati	32.04.35.2007
204	Paseh	Sukamanah	32.04.35.2008
205	Paseh	Sukamantri	32.04.35.2009
206	Paseh	Karangtunggal	32.04.35.2010
207	Paseh	Mekarpawitan	32.04.35.2011
208	Paseh	Tangsimekar	32.04.35.2012
209	Ibun	Ibun	32.04.36.2001
210	Ibun	Laksana	32.04.36.2002
211	Ibun	Dukuh	32.04.36.2003
212	Ibun	Talun	32.04.36.2004
213	Ibun	Pangguh	32.04.36.2005
214	Ibun	Lampegan	32.04.36.2006
215	Ibun	Neglasari	32.04.36.2007
216	Ibun	Mekarwangi	32.04.36.2008
217	Ibun	Sudi	32.04.36.2009
218	Ibun	Tanggulun	32.04.36.2010
219	Ibun	Cibeet	32.04.36.2011
220	Ibun	Karyalaksana	32.04.36.2012
221	Soreang	Soreang	32.04.37.2001
222	Soreang	Sadu	32.04.37.2002
223	Soreang	Panyirapan	32.04.37.2004
224	Soreang	Sukajadi	32.04.37.2010
225	Soreang	Pamekaran	32.04.37.2011
226	Soreang	Karamatmulya	32.04.37.2017
227	Soreang	Sukanagara	32.04.37.2018
228	Soreang	Cingcin	32.04.37.2019
229	Soreang	Parungserab	32.04.37.2020
230	Soreang	Sekarwangi	32.04.37.2021
231	Pasirjambu	Pasirjambu	32.04.38.2001
232	Pasirjambu	Cibodas	32.04.38.2002

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA
233	Pasirjambu	Cikoneng	32.04.38.2003
234	Pasirjambu	Cukanggenteng	32.04.38.2004
235	Pasirjambu	Cisondari	32.04.38.2005
236	Pasirjambu	Margamulya	32.04.38.2006
237	Pasirjambu	Mekarsari	32.04.38.2007
238	Pasirjambu	Mekarmaju	32.04.38.2008
239	Pasirjambu	Sugihmukti	32.04.38.2009
240	Pasirjambu	Tenjolaya	32.04.38.2010
241	Ciwidey	Lebakmuncang	32.04.39.2001
242	Ciwidey	Ciwidey	32.04.39.2002
243	Ciwidey	Nengkelan	32.04.39.2003
244	Ciwidey	Panundaan	32.04.39.2004
245	Ciwidey	Panyocokan	32.04.39.2005
246	Ciwidey	Rawabogo	32.04.39.2006
247	Ciwidey	Sukawening	32.04.39.2007
248	Rancabali	Patengan	32.04.40.2001
249	Rancabali	Sukaresmi	32.04.40.2002
250	Rancabali	Indragiri	32.04.40.2003
251	Rancabali	Cipelah	32.04.40.2004
252	Rancabali	Alamendah	32.04.40.2005
253	Cangkuang	Cangkuang	32.04.44.2001
254	Cangkuang	Ciluncat	32.04.44.2002
255	Cangkuang	Nagrak	32.04.44.2003
256	Cangkuang	Bandasari	32.04.44.2004
257	Cangkuang	Pananjung	32.04.44.2005
258	Cangkuang	Jatisari	32.04.44.2006
259	Cangkuang	Tanjungsari	32.04.44.2007
260	Kutawaringin	Jelegong	32.04.46.2001
261	Kutawaringin	Jatisari	32.04.46.2002
262	Kutawaringin	Pameuntasan	32.04.46.2003
263	Kutawaringin	Kopo	32.04.46.2004
264	Kutawaringin	Cibodas	32.04.46.2005
265	Kutawaringin	Kutawaringin	32.04.46.2006
266	Kutawaringin	Sukamulya	32.04.46.2007
267	Kutawaringin	Padasuka	32.04.46.2008
268	Kutawaringin	Buninagara	32.04.46.2009
269	Kutawaringin	Gajah Mekar	32.04.46.2010
270	Kutawaringin	Cilame	32.04.46.2011

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA